

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Atribusi

Menurut Lubis (2014), teori atribusi yang dikembangkan pertama kali oleh Fritz Heider merupakan teori yang mengungkap tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan internal, seperti kemampuan dan usaha dengan kekuatan eksternal, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau tekanan situasi tertentu dan keberuntungan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan reaksi seseorang atas kejadian di lingkungan sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas peristiwa yang dialami.

Dalam membentuk sikap seseorang, ditemukan tiga peran perilaku yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi (Lubis, 2014). Perbedaan (*distinctiveness*) merujuk pada apakah seseorang akan melakukan tindakan yang sama dalam beragam masalah yang terjadi. Konsensus ialah perbandingan perilaku satu individu dengan individu lain pada situasi yang sama. Konsistensi ialah tindakan yang dilakukan berulang sepanjang waktu.

Dalam audit, teori atribusi berkaitan dengan penilaian (*judgement*) auditor, penilaian kinerja auditor, pembuatan keputusan oleh auditor, serta menjelaskan bagaimana auditor berperilaku. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat ditentukan oleh atribusi internal dan eksternal. Atribusi eksternal merupakan

faktor-faktor yang berasal dari luar diri auditor. Sedangkan, atribusi internal ialah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri auditor, misalnya meningkatkan skeptisisme profesional seperti pencarian pengetahuan lebih lanjut, mempertahankan independensi, serta pemahaman auditor mengenai standar pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja yang berisi ketentuan dan prosedur-prosedur yang diberlakukan.

2.2. Signal Detection Theory

Menurut Wade dan Tavris (2007), *signal detection theory* ialah teori mengenai seseorang pengamat memiliki respons dalam mendeteksi sinyal dapat terbagi menjadi proses keputusan yang dipengaruhi oleh kecenderungan pada respons pengamat dan proses penginderaan atas intensitas stimulus atau sinyal dengan adanya gangguan (*noise*). Menurut Wade dan Tavris (2007), ada empat jenis respons berdasarkan *signal detection theory*, yaitu sebagai berikut:

1. *Hit*, yaitu keadaan pemeriksa mendeteksi sinyal yang benar-benar ada.
2. *False*, yaitu keadaan pemeriksa menyatakan ada sinyal, namun tidak terdapat sinyal sama sekali dalam keadaan sebenarnya.
3. *Miss*, ialah ketika pemeriksa gagal mendeteksi sinyal yang ada.
4. *Correct rejection*, ialah ketika pemeriksa menyatakan tidak ada sinyal yang memang tidak ada pada keadaan sebenarnya.

Dalam mendeteksi kecurangan, tanda atau sinyal yang menunjukkan kemungkinan sedang atau telah terjadi kecurangan dapat disebut *red flag*. Keadaan *hit* terjadi ketika auditor mampu mendeteksi serta menginvestigasi *red flag* yang

berujung pada terdeteksinya kecurangan. Sebaliknya, ketika auditor menginvestigasi *red flag* lebih lanjut, namun pada keadaan sebenarnya tidak terjadi kecurangan disebut *false*. Keadaan *miss* terjadi ketika auditor tidak mampu menemukan *red flag*, padahal sedang atau telah terjadi kecurangan dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya, *correct rejection* ialah keadaan ketika auditor mengungkapkan tidak terjadi kecurangan karena tidak menemukan *red flag* atau *red flag* yang ditemukan benar-benar tidak mengarah pada kecurangan.

2.3. Audit

Menurut Mulyadi (2002), pengauditan (*auditing*) adalah proses yang terstruktur mulai dari memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait pernyataan-pernyataan tentang kejadian-kejadian ekonomi, lalu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak pengguna yang memiliki kepentingan.

Pengertian di atas secara garis besar dapat diartikan bahwa pengauditan adalah proses sistematis terkait pemerolehan, evaluasi bukti kejadian ekonomi, sampai penyampaian hasil audit yang dilakukan oleh auditor secara objektif sehingga tanggung jawabnya untuk memberi keyakinan (asurans) bagi pihak yang berkepentingan terpenuhi.

Dalam Mulyadi (2014), tujuan audit ada dua, yaitu tujuan audit bersifat umum dan tujuan audit bersifat khusus. Tujuan audit bersifat umum ialah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, seluruh hal yang material, posisi keuangan

dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan audit bersifat khusus ialah menentukan asersi-aseri yang dibuat manajemen yang tertera dalam laporan keuangan.

Dalam Tuanakotta (2014), ISA 200.3 menyatakan tujuan audit dilakukan ialah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan tersebut. Pemberian opini oleh auditor mengenai laporan keuangan apakah telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku merupakan bentuk tujuan ini tercapai.

2.3.1. Standar Audit

Standar audit merupakan hal krusial dalam mewujudkan hasil audit yang berkualitas dan dapat diandalkan, termasuk bebas dari kecurangan. Menurut Arens (2010), audit merupakan panduan bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Dapat dikatakan standar audit merupakan standar yang dipakai auditor saat melakukan audit laporan keuangan.

Menurut IAPI standar audit mengatur tanggung jawab seluruh auditor independen dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Standar Audit mengatur dan mengharuskan auditor untuk memelihara skeptisisme profesional dari proses perencanaan sampai pelaksanaan audit. Standar audit juga mengatur dan mengharuskan auditor untuk mendapat keyakinan yang memadai terkait laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material, baik yang ditimbulkan karena kesalahan ataupun kecurangan. Maka, salah satu tugas auditor juga terkait dengan pendeteksian kecurangan.

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) nomor 240 merupakan standar audit yang secara khusus mengatur tanggung jawab auditor terkait kecurangan. SPAP 240 menyatakan auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar audit bertanggung jawab untuk mencapai keyakinan yang memadai terkait bebasnya laporan keuangan secara keseluruhan dari salah saji yang material yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Dalam memperoleh asurans yang memadai, tanggung jawab auditor besar dalam mempertahankan sikap skeptisisme profesional selama audit, menjaga independensinya, dan mempertimbangkan adanya pengabaian pengendalian manajemen, serta menyadari keefektifan prosedur audit dalam pendeteksian kesalahan barangkali tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan (iapi.or.id).

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan terikat juga pada faktor-faktor semisal banyaknya frekuensi dan luasnya manipulasi, ukuran relatif jumlah individu yang dimanipulasi, senioritas setiap individu yang terlibat, tingkat keterlibatan kolusi, dan kemahiran pelaku.

2.4. Kecurangan dalam Audit (*Fraud*)

2.4.1. Pengertian Kecurangan

Kecurangan disebut juga *fraud*. Istilah *fraud* diartikan sebagai kecurangan atau penipuan di bidang keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi (*fraud*) adalah salah saji dalam pelaporan keuangan yang sengaja dilakukan, misalnya tidak mengungkapkan atau menghilangkan jumlah untuk mengecoh atau membohongi pengguna laporan keuangan, serta salah saji

yang timbul karena perlakuan yang tidak semestinya, seperti penggelapan atau penyalahgunaan terkait pencurian aset yang merujuk kepada laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pengertian kecurangan akuntansi (*fraud*) menurut Hall (2007) adalah penipuan yang dilakukan dengan sengaja, melaporkan aktiva perusahaan dengan tidak benar atau memanipulasi data keuangan guna memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya.

Dari beberapa pengertian *fraud* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah perbuatan-perbuatan kecurangan atau penipuan yang melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan diri pelaku kecurangan tersebut. Hal ini menunjukkan kecurangan (*fraud*) berbeda dengan kesalahan (*errors*). *Fraud* terjadi karena ada kesengajaan pelaku, sedangkan *errors* terjadi tanpa ada unsur kesengajaan.

2.4.2. Jenis-jenis Kecurangan

Beberapa bentuk *fraud*, yaitu bentuk kejahatan atau tindak pidana, seperti penggelapan aset, pencurian, penggelapan kewajiban, penggelapan informasi, penyembunyian dan penghilangan bukti, rekayasa fakta, dan korupsi. Dalam Tuanakotta (2010), *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE), mengategorikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Financial Statement Fraud meliputi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif atau pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintahan dengan menyajikan laporan keuangan yang direkayasa (*financial*

engineering) untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Bentuk kecurangan ini dapat dianalogikan dengan *window dressing*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak pelaku. Kecurangan ini dapat bersifat non finansial dan kecurangan finansial.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan pencurian/penyalahgunaan/pengambilan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. *Asset misappropriation* dapat digolongkan menjadi:

- a. Kecurangan kas (*cash fraud*); beberapa bentuk kecurangan kas ialah pencurian kas dan pengeluaran atau pemakaian kas yang tidak benar seperti pemalsuan cek.
- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*); adalah bentuk kecurangan seperti pencurian dan pemakaian persediaan atau aset lainnya untuk kepentingan pribadi.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi sering terjadi pada sektor pemerintahan. Koalisi atau kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan korupsi membuat korupsi sulit dideteksi. Menurut ACFE, korupsi terbagi menjadi:

- a. Pertentangan Kepentingan (*conflict of interest*)
- b. Suap (*bribery*)
- c. Pemberian Ilegal (*illegal gratuity*)
- d. Pemerasan (*economic extortion*)

Dalam Standar Audit (SA) 240 mengenai Tanggung Jawab Auditor terkait Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, ada 2 (dua) tipe kecurangan yang menyebabkan salah saji material yang relevan dengan pertimbangan auditor, yaitu:

1. Salah saji atau penghilangan secara sengaja terhadap jumlah dalam laporan keuangan, seperti:
 - a) Pemalsuan, manipulasi, atau perubahan catatan dokumen pendukungnya yang merupakan sumber data dalam penyajian laporan keuangan,
 - b) representasi yang salah atau penghilangan peristiwa atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan,
 - c) salah menerapkan prinsip akuntansi dalam hal berkaitan dengan klarifikasi, jumlah, dan cara penyajian.
2. Salah saji yang diakibatkan karena adanya perlakuan yang tidak semestinya pada aset, atau yang biasa disebut penyalahgunaan. Aktivitas penyalahgunaan seperti penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aset, bahkan aktivitas yang menyebabkan entitas harus membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas karena adanya dokumen palsu.

2.4.3. Klasifikasi Kecurangan

Kecurangan dapat diklasifikasikan berdasarkan sisi korban kecurangan, sisi pelaku, dan konsekuensi hukum yang timbul atas kecurangan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Karyono, 2013):

1. Kecurangan Diamati dari Sisi Korban Kecurangan

- Kecurangan/penipuan oleh pihak dalam dan luar terhadap organisasi yang berakibat buruk bagi organisasi serta merugikan unit organisasi.
- Kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti meningkatkan laba atau penjualan, mengurangi hutang pemegang saham atau kreditor, dll.

2. Kecurangan Diamati dari Sisi Pelaku Kecurangan

- Kecurangan dari internal organisasi, seperti kecurangan manajemen, karyawan, dan eksekutif terhadap organisasi.
- Kecurangan yang dilakukan pihak eksternal (luar) terhadap organisasi.

3. Kecurangan Diamati dari Sisi Konsekuensi Hukum yang Ditimbulkan

Kecurangan digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau kriminal. Misalnya, kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata dapat muncul ketika terjadi pelanggaran perikatan dan terjadi gugatan oleh pihak yang dirugikan.

2.4.4. Faktor-faktor Penyebab Kecurangan

2.4.4.1. *The Fraud Triangle Theory*

Dalam Karyono (2013), Cressey mengemukakan *fraud triangle theory*.

Terdapat 3 faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, antara lain:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang dirasakan seseorang dapat mendorongnya untuk melakukan kecurangan. Misalnya, untuk memperbaiki posisinya di entitasnya atau tekanan karena seseorang memiliki hutang yang membuatnya terpaksa melakukan kecurangan. *Pressure* berawal dari adanya tekanan dari organisasi atau dari diri individu itu sendiri. Kebutuhan individu dianggap lebih penting daripada kebutuhan organisasi.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Fraud dapat dilakukan seseorang jika orang tersebut memiliki kesempatan dan kanal terhadap aset atau memiliki wewenang untuk terlibat mengatur prosedur pengendalian yang membuka jalan untuk melakukan kecurangan. Perusahaan atau sektor pemerintahan yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan semakin besar. Jika pengendalian baik, maka kesempatan berbuat kecurangan akan berkurang dan dapat dihilangkan. *Opportunity* adalah satu-satunya faktor yang dapat dikendalikan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Orang yang melakukan kecurangan memandang bahwa kecurangan adalah hal wajar untuk dilakukan atau bisa dikatakan pelaku kecurangan melakukan justifikasi atau pembenaran diri sehingga melakukan kecurangan dengan menganggap tidak ada pihak yang akan dirugikan atau mereka beranggapan mereka hanya mengambil sedikit saja. Pelaku

kecurangan juga cenderung membenarkan perbuatannya jika lingkungan organisasinya sebagian besar melakukan kecurangan dan tindakan-tindakan yang tidak jujur.

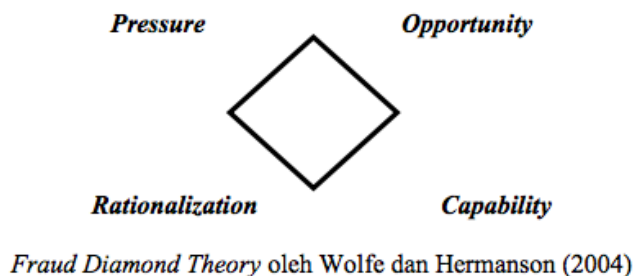
2.4.4.2. *Fraud Diamond Theory*

Fraud diamond theory dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Bentuk ini adalah bentuk penyempurnaan dari *fraud triangle* yang dikemukakan Cressey pada 1953. *Fraud Diamond Theory* menambahkan *capability* sebagai satu elemen yang dipercayai memberi pengaruh signifikan kepada kecurangan. Elemen-elemen dari *fraud diamond theory* antara lain:

1. *Incentive/Pressure*: adanya tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. *Opportunity*: adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang dimanfaatkan orang melakukan *fraud*.
3. *Rationalization*: adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan.
4. *Capability*: memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang melakukan *fraud*.

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat orang yang melakukan *fraud* harus memiliki kapabilitas/kemampuan untuk melihat pintu atau kesempatan yang terbuka dan memanfaatkannya bukan hanya sekali namun berkali-kali. Mereka menyatakan bahwa dengan pembaruan *fraud triangle* dengan menambahkan elemen *capability* dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud*.

Gambar 2.1



2.4.5. Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Dalam Standar Audit seksi 110 (PSA No. 02), tugas auditor dalam mendeteksi kecurangan ialah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait kebebasan laporan keuangan dari salah saji material yang ditimbulkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan dapat merugikan berbagai pihak. Oleh sebab itu, auditor harus dapat mendeteksinya dengan tepat sehingga tidak terjadi kegagalan audit. Maka seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan serta pengetahuan yang memadai dalam mendeteksi kecurangan (IAI, 2011).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat diartikan kemampuan/kesanggupan auditor dalam menemukan dan menentukan tindakan kecurangan yang mengakibatkan salah saji material dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja (Kumaat, 2011). Menurut Hartan dan Waluyo (2016), kemampuan auditor diartikan keahlian dan kemahiran yang dimiliki guna melaksanakan tugas-tugasnya, seperti mengumpulkan bukti-bukti, membuat *judgement*, mengevaluasi pengendalian internal, dan menilai risiko audit. Auditor

dituntut untuk memberikan jasa terbaik bagi perusahaan atau entitas yang membutuhkan. Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas auditor dalam menjelaskan laporan keuangan perusahaan yang disajikan dengan kurang wajar dengan cara melakukan proses identifikasi. Jika ditemui keadaan yang tidak biasa ataupun ada hal memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, maka auditor perlu melakukan penyelidikan lebih jauh dan membuktikannya.

Dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu memiliki beberapa kemampuan/ keahlian sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kecurangan
2. Kesanggupan auditor dalam tahap pendeteksian kecurangan

2.5. Skeptisisme Profesional

2.5.1. Konsep Dasar Skeptisisme Profesional

Menurut Islahuzzaman (2012), skeptisisme berarti sikap ragu-ragu auditor terhadap pernyataan-pernyataan yang dasar pembuktiannya belum cukup kuat. Auditor tidak begitu saja percaya, namun perlu pembuktian yang kuat. Skeptisisme profesional adalah tanggapan wajar dari auditor yang berhadapan dengan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang tidak disengaja (*errors*) maupun yang berniat jahat (*fraud*) (Tuanakotta, 2015). Menurut Quadackers (2009), kata profesional dalam skeptisisme berarti auditor telah dididik dan terus melatih diri untuk menerapkan keahliannya dalam membuat keputusan yang sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Definisi skeptisisme profesional dalam Standar Audit (SA 200 paragraf 13(l)), ialah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Namun, Basu (2009) menambahkan, sikap skeptisisme profesional kiranya tidak menjadi sikap curiga yang berlebihan dan menjadi skeptis sepenuhnya. Auditor hendaknya menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya saja dengan tidak berlebihan.

2.5.2. Pentingnya Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional auditor sangat berperan untuk mengurangi kemungkinan terjadi kecurangan. Karena jika auditor selalu bersikap skeptis, auditor akan mencari informasi lebih dalam dari manajemen tentang keputusan-keputusan akuntansi yang diambil, dan mencari bukti-bukti audit untuk mendukung keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh manajemen (*Financial Reporting Council, 2010*).

Skeptisisme profesional juga berperan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Menurut Peurseem (2010), profesi auditor selalu berhubungan dengan pencarian dan pembuktian kebenaran dari bukti-bukti audit yang berupa dokumen dan kertas kerja, dan dari prosedur standar yang dianut, namun auditor bekerja tidak hanya untuk memenuhi prosedur yang ada, terlebih lagi saat menemukan bukti-bukti yang penting. Namun, dalam mengevaluasi

bukti-bukti audit auditor harus memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tepat, seperti tidak mengasumsikan bahwa manajemen berlaku curang atau mengasumsikan kejujuran manajemen absolut (Arens dkk, 2010).

2.5.3. Karakteristik Skeptisisme Profesional

Fullerton dan Durtschi (2004) mengembangkan model sebagai indikator dalam mengukur skeptisisme profesional. Pada orang yang menerapkan sikap skeptisisme terdapat enam karakteristik utama, yaitu:

1. Karakteristik mengenai pengujian bukti audit

a) Pikiran yang mempertanyakan (*questioning mind*)

Penerapan skeptisisme profesional dapat dilakukan dengan pola pikir yang bertanya-tanya yang berkelanjutan mengenai suatu alasan atau pembuktian terhadap informasi dan bukti yang diperoleh.

b) Penundaan keputusan (*suspension of judgement*)

Auditor menahan diri untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan audit sampai mendapatkan bukti yang cukup dan memadai.

c) Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*)

Sikap skeptis didasari sikap rasa ingin tahu sehingga dapat menambah pengetahuan atau informasi yang dapat digunakan dalam melakukan audit.

2. Karakteristik mengenai pemahaman bukti audit

a) Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)

Dalam melakukan evaluasi bukti auditor perlu paham mengenai tujuan, motivasi, dan integritas pihak yang memberikan bukti untuk memastikan apakah bukti audit yang diberikan sudah valid.

3. Karakteristik mengenai inisiatif untuk bersikap skeptis berdasarkan bukti audit yang diperoleh

a) Percaya diri (*self-confidence*)

Percaya diri perlu dimiliki auditor agar yakin akan kemampuan dirinya dalam mengolah dan merespons bukti-bukti yang dikumpulkan sehingga auditor mampu memilah informasi yang tidak konsisten dan dapat mempertimbangkan penjelasan dari orang lain.

b) Keteguhan diri (*self-determination*)

Auditor memutuskan tingkat bukti yang diperlukan untuk hipotesis tertentu serta menyimpulkan bukti yang dikumpulkan secara objektif.

2.6. Independensi Auditor

2.6.1. Konsep Dasar Independensi Auditor

Menurut Mulyadi (2012), independensi adalah tindakan yang bebas dari pengaruh atau kendali orang lain. Kemudian, auditor yang jujur dalam mempertimbangkan fakta, merumuskan dan menyatakan pendapatnya secara objektif dan tidak memihak disebut independen.

Pengertian di atas berarti auditor yang independen adalah auditor yang bersikap objektif, jujur, tidak terpengaruh oleh pihak mana pun dan tetap melakukan proses audit dan memberikan opini sesuai standar audit yang berlaku.

2.6.2. Pentingnya Independensi Auditor

Dalam melakukan pengauditan, akuntan publik harus menyadari adanya tanggung jawab yang besar selain kepada klien, tetapi juga kepada publik. Tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan, meskipun dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut harus ada pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens dkk, 2010).

Jika auditor tidak bersikap independen, maka hasil audit yang dilaporkan tidak dapat sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang ada sehingga tidak dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988). Maka, independensi seorang auditor sangat berperan dalam membuat hasil laporan audit yang wajar dan andal sehingga bebas dari kecurangan.

2.6.3. Aspek-aspek Independensi Auditor

Menurut Soekrisno (2012), independensi memiliki tiga aspek, yaitu:

1. *Independence in fact* (independensi dalam kenyataan), yaitu sikap independen dalam melaksanakan tugasnya, seperti dalam memeriksa fakta-fakta auditor harus objektif dan tidak berprasangka karena hal tersebut menjadi dasar pembuatan opini. Jika dalam kenyataannya,

sepanjang pengauditan auditor tidak memihak, dapat dikatakan terdapat independensi dalam kenyataan.

2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan pada struktur organisasi perusahaan), berarti auditor internal yang merupakan karyawan perusahaan tampaknya tidak independen, namun auditor eksternal dapat dikatakan independen karena berada di luar perusahaan.
3. *Independence in mind* (independensi dalam berpikir), yaitu dalam melakukan proses audit, auditor memerlukan audit penting atau menerima temuan audit yang menunjukkan pelanggaran atau korupsi. Kemudian auditor mempertimbangkan untuk memakai pengetahuan ini untuk memeras klien, meskipun baru dalam pikiran belum diimplementasikan.

Dalam Tuanakotta (2011), menurut Mautz dan Sharaf terdapat tiga jenis independensi, yaitu:

1. *Programming Independence* (Independensi Program)
Bebas dari pengaruh dan kontrol orang lain, misalnya dalam pembatasan memilih teknik dan prosedur pengujian, serta kedalaman prosedur dan teknik pengujian
2. *Investigative Independence* (Independensi Investigatif)
Bebas dari kontrol dan pengaruh orang lain dalam memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, serta pedoman manajemen untuk

diperiksa. Sehingga tidak ada informasi sah yang tertutup untuk diperiksa.

3. *Reporting Independence* (Independensi Pelaporan)

Bebas dari kontrol dan pengaruh pihak lain dalam batasan untuk menyajikan fakta yang telah ditinjau atau bebas dalam membuat rekomendasi atau pendapat sebagai hasil tinjauan.

2.7. Standar Pengendalian Mutu

2.7.1. Konsep Pemahaman Standar Pengendalian Mutu

Dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit yang dikerjakan, diperlukan sistem pengendalian mutu KAP yang baik. Menurut IAPI dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1 paragraf 1), standar pengendalian mutu merupakan standar yang patut dimiliki oleh KAP sebagai panduan bagi KAP pada proses pelaksanaan audit. Standar pengendalian mutu mengatur tanggung jawab kantor akuntan publik (KAP) untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan auditor menaati standar pengendalian mutu yang berlaku.

Dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1 paragraf 3) sistem pengendalian mutu terdiri dari kebijakan terkait KAP untuk memberikan keyakinan yang memadai dan prosedur untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Dengan kata lain, sistem pengendalian mutu KAP berisi prosedur dan kebijakan-kebijakan yang harus dibentuk sesuai dengan pemenuhan aturan standar pengendalian mutu yang berlaku. Auditor patut memahami standar

pengendalian mutu karena standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAPI merupakan dasar atau pedoman bagi KAP dalam merancang sistem pengendalian mutunya, yang mana harus dipatuhi dan diikuti oleh auditor dalam penugasannya.

Pemahaman merupakan proses seseorang dalam menduga, menerangkan, mempertahankan, membedakan, memperluas, menyamaratakan, dan menyimpulkan sesuatu (Arikunto, 2010). Pemahaman meliputi kemampuan seseorang dalam memahami makna dari suatu hal yang dilihat dan dipelajari. Seluruh kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang telah dirancang KAP patut dikomunikasikan ke seluruh rekan dan staf KAP agar setiap anggota memahami pentingnya menerapkan SPM agar hasil audit yang dikerjakan sesuai dengan kondisi sebenarnya. KAP yang memiliki sistem pengendalian mutu yang baik serta seluruh anggotanya paham dengan benar akan pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KAP tersebut.

2.7.2. Pentingnya Standar Pengendalian Mutu KAP

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1 paragraf 11) menyatakan sistem pengendalian mutu ditetapkan dan perlu dipelihara oleh Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh anggota KAP sanggup memenuhi tanggung jawabnya dengan mematuhi standar profesi, ketentuan hukum, dan peraturan lain yang berlaku. Dan juga, KAP mampu memberi keyakinan bahwa laporan yang diterbitkan sudah benar dan sesuai kondisi sesungguhnya.

2.7.3. Indikator Standar Pengendalian Mutu

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2011) terdapat SPM seksi 100 (PSPM No.1) yang menjabarkan 9 unsur pengendalian mutu:

1. Independensi

KAP harus menentukan kebijakan dan mendesain prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan seluruh personelnnya telah menaati ketentuan etika yang relevan, yaitu dengan mempertahankan independensi. KAP harus membuat ketentuan dan prosedur yang dirancang dengan menentukan: a) kriteria yang mengarah pada *safeguards* atau perlindungan terhadap *familiarity threat* atau ancaman keakraban ketika menggunakan personel senior yang sama pada perikatan audit yang berlangsung lama, dan b) untuk seluruh audit laporan keuangan diharuskan adanya rotasi rekan perikatan pada masa waktu menurut standar yang berlaku (Hayes dkk, 2014).

2. Penugasan Personel

KAP harus membuat kebijakan dan prosedur menetapkan personel yang ditugaskan dalam sebuah perikatan memiliki kemampuan, kompetensi yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan, serta personel yang mampu menaati standar, hukum, dan etika profesi yang berlaku (Raves dkk, 2014). Salah satu contoh prosedur yang dapat diterapkan ialah setiap personel harus dievaluasi atas setiap penugasan audit dengan menggunakan laporan penilaian penugasan individu.

3. Konsultasi

Dalam memberikan keyakinan yang memadai, KAP harus merancang prosedur dan ketentuan yang mendorong perikatan dilakukan dengan baik, yaitu personel yang bertugas telah mematuhi standar yang berlaku, dan menghasilkan hasil audit yang objektif, serta mengaplikasikan sistem pengendalian mutu KAP tersebut dengan baik. Prosedur yang dapat diterapkan ialah dengan melakukan konsultasi atas pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman dengan anggota yang lebih berpengalaman (Arens, 2015).

4. Supervisi

KAP perlu membuat sistem pengendalian yang mengharuskan adanya supervisi atau penelaahan pengendalian mutu pada perikatan yang berlangsung, seperti membuat kebijakan dan prosedur yang mengatur: 1) pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan program audit, 2) setiap pekerjaan dan hasil yang diperoleh telah didokumentasikan dengan memadai, 3) tujuan-tujuan dari setiap prosedur audit telah tercapai. Sehingga kesimpulan yang didapat konsisten dengan hasil audit dan mendukung opini audit (Hayes dkk, 2014).

5. Pemekerjaan (*Hiring*)

KAP wajib merancang kebijakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa personel yang melakukan audit memiliki pengetahuan dan karakteristik yang tepat maka personel dapat melakukan perikatan dengan kompeten (IAPI, 2011).

6. Pengembangan Profesional

Kebijakan dan prosedur mutu yang dibuat oleh KAP guna memberi keyakinan yang memadai mengenai pengembangan profesional bahwa setiap personel memiliki pengetahuan yang layak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sarana yang dapat disediakan KAP untuk personilnya ialah pelatihan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan (IAPI, 2011).

7. Promosi

Promosi merupakan kebijakan dan prosedur mutu yang dirancang oleh KAP mengenai pengembangan profesional personelnya yang memiliki pengetahuan yang memadai agar dapat memenuhi tanggung jawabnya (IAPI, 2011). Promosi dilakukan untuk mengembangkan potensi personelnya karena diberi tanggung jawab dan tantangan yang lebih besar serta mempertahankan sumber daya KAP.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

KAP harus membentuk kebijakan dan prosedur terkait penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang memberi keyakinan yang memadai bahwa KAP: 1) telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang mengarah kepada kurangnya integritas klien, 2) kompeten dalam melaksanakan perikatan dengan memiliki kapabilitas, waktu, dan sumber daya dalam pelaksanaannya, dan 3) mampu menaati ketentuan etika profesi. Salah satu prosedur yang bisa diterapkan adalah adanya formulir penilaian klien untuk klien baru sebelum penerimaan dan

melakukan identifikasi atau *review* sebagai upaya perolehan informasi yang bisa menyebabkan penolakan perikatan (Hayes dkk, 2014).

9. Inspeksi

Dalam Hayes, dkk (2014) Kebijakan dan prosedur dibentuk KAP untuk memeriksa sistem pengendalian mutu sudah relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif, dan dipatuhi dalam praktiknya. Salah satu prosedur yang dapat diterapkan adalah untuk memeriksa kepatuhan KAP, partner bagian pengendalian mutu menguji pengendalian mutu setidaknya setahun sekali.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Hubungan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Definisi skeptisisme profesional dalam Standar Audit (SA 200 paragraf 13(l)), ialah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat jika auditor menemukan gejala-gejala atau indikator kesalahan maupun kecurangan, auditor dengan tingkat skeptisisme yang tinggi akan meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan tersebut dengan cara menggali informasi lebih dalam tentang

penemuan itu. Maka, tingkat skeptisisme profesional seorang auditor mempengaruhi tingkat kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

2.8.2. Hubungan Independensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Menurut Mulyadi (2012), independensi adalah independensi adalah tindakan yang bebas dari pengaruh atau kendali orang lain. Kemudian, auditor yang jujur dalam mempertimbangkan fakta, merumuskan dan menyatakan pendapatnya secara objektif dan tidak memihak disebut independen.

Berdasarkan konsep di atas, dapat kita ketahui auditor dengan sikap independen tidak akan terpengaruh dengan tekanan dari pihak mana pun sehingga lebih jujur dalam melakukan proses audit. Jika auditor menemukan suatu indikasi kecurangan, auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi akan dengan tegas menyelidiki dan melaporkan salah saji tersebut dalam laporan hasil auditnya, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan klien yang membayar auditor untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, auditor dengan independensi yang rendah akan lebih mudah terpengaruh dan dapat dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan sehingga auditor tidak menyelidiki lebih lanjut dan tidak mampu mengungkap temuan indikasi kecurangan. Hal ini menunjukkan, auditor dengan independensi yang tinggi lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga kecurangan mampu dideteksi dan dilaporkan dengan akurat.

2.8.3. Hubungan Pemahaman Standar Pengendalian Mutu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Menurut IAPI dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1 paragraf 1-3), Sistem Pengendalian Mutu merupakan pedoman bagi KAP yang di dalamnya terdapat prosedur dan kebijakan-kebijakan yang dirancang agar KAP mampu menyediakan keyakinan atau asurans yang memadai. Maka, setiap KAP wajib memiliki sistem pengendalian mutu yang baik yang mana sejalan dengan yang diatur dalam standar pengendalian mutu.

Sistem pengendalian mutu KAP terdapat prosedur yang dirancang dan dikembangkan oleh KAP untuk membantu auditor independen dalam memberikan keyakinan pada hasil audit. Sistem pengendalian mutu yang sejalan dengan standar yang berlaku bertujuan untuk memberi arahan bagi auditor untuk mematuhi segala kebijakan dan prosedur dalam proses audit agar dapat dilakukan dengan tepat dan terkendali. Oleh sebab itu, standar pengendalian mutu jika dipahami dan diterapkan dengan baik mampu membantu kinerja auditor untuk lebih jeli dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor menjadi lebih handal dalam mewujudkan asurans pada hasil audit bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu memperoleh bukti empiris bahwa faktor skeptisisme profesional, independensi, dan pemahaman standar pengendalian mutu berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	UJI	HASIL
1	Widiyastuti dan Pamudji (2009)	<p>Variabel independen: X1: Kompetensi X2: Independensi X3: Profesionalisme</p> <p>Variabel dependen: Y1: Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta	<p>Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>).</p>
2	Indrawati, dkk (2019)	<p>Variabel independen: X1: Skeptisisme Profesional X2: Independensi Auditor X3: Pelatihan Audit Kecurangan</p> <p>Variabel dependen: Y1: Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan</p>	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang Raya yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)	<p>Skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan</p> <p>Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan</p> <p>Pelatihan audit kecurangan tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan</p>
3	Hartan dan Waluyo (2016)	<p>Variabel independen: X1: Skeptisme Profesional X2: Independensi X3: Kompetensi</p>	Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	Skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

		Variabel dependen: Y : Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan		Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan Skeptisisme profesional, Independensi, dan Kompetensi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan
4	Darmawati dan Puspitasari (2018)	Variabel independen: X1 : Standar Pengendalian Mutu Variabel dependen: Y : Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jabodetabek	Penerapan standar pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
5	Suryanto, dkk (2017)	Variabel independen: X1 : Beban Kerja X2 : Pengalaman Kerja X3 : Skeptisisme Profesional X4 : Tipe Kepribadian (NT- <i>Intuition</i> dan <i>Thinking</i>) Variabel dependen: Y : Kemampuan Mendeteksi Kecurangan	Kantor Akuntan Publik (KAP) kecil di wilayah Yogyakarta dan Surakarta	Beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan Pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akuntansi Skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akuntansi Tipe kepribadian berpengaruh NT dan signifikan terhadap kemampuan auditor

				dalam mendeteksi kecurangan akuntansi
--	--	--	--	---------------------------------------

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Skeptisisme profesional dalam Standar Audit (SA 200 paragraf 13(1)), ialah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Pernyataan tersebut menunjukkan semakin tinggi sikap waspada, selalu bertanya-tanya dalam diri auditor, serta sikap tidak langsung percaya pada pernyataan klien, maka akan semakin mudah indikasi kecurangan terdeteksi. Dalam menghadapi gejala kecurangan, auditor dengan sikap skeptisisme yang tinggi akan melakukan pencarian informasi-informasi tambahan terhadap penemuan tersebut untuk meningkatkan kemampuan mendeteksinya sehingga dapat diyakinkan auditor mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dengan tingkat skeptisisme yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2018) dan Hartan dan Waluyo (2016) menunjukkan tingkat skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dapat dijelaskan kecurangan umumnya dapat terjadi akibat kurangnya sikap skeptisisme auditor. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Suryanto, dkk (2017). Penelitian tersebut menunjukkan skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Meskipun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu ada perbedaan, namun secara teori skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁: Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

2.10.2. Pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Menurut Mulyadi (2012), independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh serta pertimbangan yang jujur dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas, auditor harus netral dan tidak berada dalam pengaruh pihak mana pun agar hasil audit berkualitas dan sesuai keadaan sebenarnya. Auditor yang independen berarti auditor yang tidak memihak, jujur, dan objektif. Meskipun klien membayar auditor atas jasa yang diberikan, opini dan tindakan auditor harus jujur dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam

melakukan proses audit. Maka, independensi menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang memiliki independensi tinggi ialah auditor yang tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, akan lebih mampu mengamati dan mengungkap kecurangan dari bukti-bukti audit yang potensial. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2019) menyimpulkan semakin tinggi tingkat independensi auditor, maka kemampuan auditor semakin meningkat dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Widiyastuti dan Pamudji (2009) dan penelitian Hartan dan Waluyo (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara independensi dan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha2: Independensi berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

2.10.3. Pengaruh Pemahaman Standar Pengendalian Mutu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 menjelaskan sistem pengendalian mutu yang merupakan panduan atau pedoman bagi KAP yang di dalamnya terdapat prosedur dan kebijakan-kebijakan yang dirancang agar KAP mampu menyediakan keyakinan yang memadai. Sistem pengendalian mutu merupakan arahan bagi auditor agar lebih jeli mendeteksi kecurangan dalam melakukan proses audit. Auditor patut memandang sistem pengendalian mutu tidak hanya

formalitas saja, melainkan memahami bahwa kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu tersebut dijalankan untuk pemenuhan standar pengendalian mutu yang diatur oleh IAPI. Pemahaman auditor yang benar serta kepatuhannya, menunjukkan mereka bertanggung jawab terhadap profesinya (Darmawati dan Puspitasari, 2018). Maka itu, auditor tidak dapat hanya menerapkan sistem pengendalian mutu saja tetapi juga membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai standar pengendalian mutu sehingga mampu mewujudkan ketaatan akan standar yang berlaku, serta mampu membantu auditor melakukan proses audit dengan tepat sehingga dapat menghasilkan hasil audit yang memadai. Maka, dapat dikatakan pemahaman auditor terhadap standar pengendalian mutu KAP yang baik mampu membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam proses audit.

Penelitian Darmawati dan Puspitasari (2018) menunjukkan pemahaman standar pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Jika pemahaman auditor tentang SPM baik, maka semakin meningkat pula integritas auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk dalam mendeteksi kecurangan. Peningkatan tersebut mempengaruhi kualitas audit yang baik, yaitu hasil audit yang memberi keyakinan yang memadai dan bebas dari kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki hipotesis:

Ha3: Pemahaman Standar Pengendalian Mutu berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan